

Santri 4 Ponpes Terinfeksi Covid-19

KEBUMEN (KR) - Dalam sehari sejak Senin (5/10) sampai Selasa 6/10) pasien positif Covid-19 di Kebumen bertambah 86 orang. Dengan penambahan itu, jumlah pasien positif Covid-19 di Kebumen pada Selasa (6/10) sore mencapai 803 orang. Adapun jumlah pasien meninggal dunia 21 orang, 3 orang di antaranya meninggal pada 3 Oktober sampai 5 Oktober 2020. Terkait penambahan 86 pasien tersebut menurut Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kebumen Cokro Aminoto, didominasi oleh pasien yang (85 orang) memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid-19 terdahulu dan 1 orang memiliki riwayat bepergian ke Yogyakarta. "Mereka yang kontak dengan pasien terdahulu di antaranya 18 orang berada di lingkungan pondok pesantren, 4 orang berada di sebuah kompleks perumahan dan 1 orang pekerja sebuah rumah sakit di Kebumen," ujar Cokro, Selasa (6/10).
Terdeteksinya banyak pasien baru tersebut merupakan hasil penelusuran Gugus Tugas terhadap warga yang diketahui memiliki riwayat kontak dengan para pasien terdahulu, termasuk di lingkup pondok pesantren. Adapun 3 pasien meninggal dunia masing-masing SUT (65), perempuan asal Kecamatan Puring yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 tak memakai masker. **(Dwi)**

Sinkronisasi Batas Purworejo-Kulonprogo

PURWOREJO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan Kulonprogo melakukan pertemuan finalisasi sinkronisasi batas daerah. Kegiatan ini sekaligus sebagai tindak lanjut hasil sinkronisasi peta batas wilayah antara kedua kabupaten di dua wilayah provinsi ini yang telah dilaksanakan awal September 2020. Sinkronisasi dilaksanakan pada tiga sub segmen masing-masing, segmen Kecamatan Kaligesing dengan Kapanewon Kokap, Samigaluh dan Girimulyo, segmen Kecamatan Bagelen dengan Kapanewon Kokap serta segmen Kecamatan Bener dengan Kapanewon Samigaluh. "Ketidakjelasan batas daerah dapat menyebabkan terjadinya sengketa yang dapat berpengaruh terhadap fungsi pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik," kata Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti MA, Rabu (7/10).
Dalam pertemuan dengan pejabat Pemkab Kulonprogo yang dipimpin Sekretaris Daerah Kulonprogo Ir RM Astungkoro MHum di Ruang Arahwang Kantor Bupati Purworejo Yuni Astuti didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait menjelaskan, persoalan batas daerah harus diupayakan untuk diselesaikan secara komprehensif dan sedini mungkin. Ini sekaligus merupakan agenda penting dalam melaksanakan otonomi daerah. "Batas daerah dibutuhkan untuk menghitung luas daerah yang merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)," tambahnya. **(Nar)**

Progam Diskon Tambah Daya Diperpanjang

SEMARANG (KR) - PLN memperpanjang program 'Super Merdeka' hingga 31 Oktober 2020 sebab melihat animo yang sangat tinggi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Industri Kecil Menengah, pada program tambah daya hingga 4/10 total pelanggan 30.000 yang mendaftar untuk memanfaatkan program tersebut. "Kami bersyukur program ini mendapat sambutan luar biasa hanya sampai 3/Oktber, namun melihat animo masyarakat akhirnya kami perpanjang hingga 31 Oktober 2020," ujar Executiv Vice President Corporate Communicatoin dan CSR PLN, Agung Murdifi kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (8/19).
Melalui progam tersebut, PLN ingin memberikan biaya tambah daya yang super ekonomis demi membantu dalam meningkatkan UMKM dan IKM ditengah pandemic, mengingat UMKM dan IKM adalah backbone kegiatan ekonomi pada saat ini dan layanan Super Merdeka adalah kepekaan PLN kepada pelanggan UMKM dan IKM yang membutuhkan listrik untuk kegiatan bisnisnya, mulai dari daya 450 VA sampai dengan 13.200 VA dengan pilihan daya sampai dengan daya 16.599 VA. Untuk para pelanggan yang ingin menikmati promo 'Super Merdeka' untuk UMKM/IKM dapat berhubungan melalui Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123) telepon 123, e Mail pln 123@pln.co.id dan melalui kantor Unit Layanan Pelanggan PLN terdekat. **(Fre)**

PT TIV Bangun PLTS Terbesar di Jateng

KLATEN (KR) - PT Tirta Investama (TIV) Aqua Klaten membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terbesar di Jateng, berkapasitas 2.919 kilowatt peak (KWp). Kepala Pabrik Aqua Klaten I Ketut Muwaranata, Rabu (7/10) mengemukakan, PLTS Atap (rooftop) bisa menghasilkan listrik sebesar 4 Gigawatt hour (GWh) setiap tahunnya. Hal itu bisa mengurangi 3.340 ton CO2/tahun. "Total kapasitas terpasang di pabrik Klaten sebesar 2.919 kilowatt peak, yang terdiri 8.340 modul solar panel. Terbentang di 4 gedung produksi kami, dengan luasan 16.550 meter persegi," kata I Ketut Muwaranata.
Dijelaskan, kapasitas tersebut dinilai sudah sesuai target karena PLTS memanfaatkan bentangan atap untuk pemasangan instalasi. Sedangkan empat bentangan atap pabrik tersebut sudah terisi penuh dengan modul solar panel. PLTS rooftop tersebut setiap hari berhasil menurunkan emisi karbon rata-rata sebanyak 8 ton. Hal ini setara dengan keberadaan 100 pohon setiap hari, yang mampu dengan efektif mengubah karbon dioksida (CO2) menjadi oksigen (O2). Pemasangan PLTS atap bisa mengcover 10 hingga 20 persen dari total energi yang digunakan PT Tirta Investama Klaten. **(Sit)**



KR-Sni Warsiti
I Ketut Muwaranata dan Stakeholder/External Communication Manager Danone Aqua Regional III, Rony Rusdiansyah, menunjukkan bentangan panel surya di atap pabrik.

Penanganan Longsor di Purworejo Jadi Percontohan



PURWOREJO (KR) - Penanganan pascabencana tanah longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Purworejo dapat menjadi percontohan daerah lain di Indonesia. Pemkab dinilai membuat terobosan yang bagus dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah relokasi korban bencana tanah longsor.
Hal tersebut disampaikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI M Syafii Nasution, saat Penyalaran Bantuan Bahan Ba-

ngunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana Tanah Bergerak di Kabupaten Purworejo, Rabu (7/10). "Model penanganan seperti di Purworejo itu dapat dijadikan percontohan untuk kabupaten/kota lain di Indonesia," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah pusat juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Purworejo dalam membangun sinergitas berbagai unsur dalam penanganan bencana. Berdasar informasi yang disampaikan, unsur lintas OPD, pemerintahan tingkat kecamatan hingga desa, dilibatkan dalam kebijakan penanganan bencana.
Pemkab Purworejo memberi kelonggaran kepada masyarakat dengan memperbolehkan apabila mereka memiliki keinginan untuk mengadakan tanah secara mandiri. "Jadi masyarakat korban bencana bisa merasakan bahwa negara itu adil," ucapnya. Kemensos

menyalurkan bantuan BBR Rp 25 juta/penerima yang diwujudkan dalam bentuk bahan bangunan.
Asisten Administrasi dan Kesra Setda Purworejo Pram Prasetya Achmad mewakili Pjs Bupati Purworejo Yuni Astuti mengatakan, Pemkab Purworejo membeli beberapa bidang tanah untuk dihibahkan kepada korban bencana tanah bergerak di beberapa lokasi, dengan peruntukan dibangun rumah. Pemerintah pusat, lanjutnya, mengapresiasi karena terobosan itu belum pernah dilakukan di daerah lain.
Pemkab Purworejo juga memberikan perhatian kepada korban bencana lain seperti banjir, angin puting beliung. Perhatian, lanjutnya, mulai darurat bencana, pascabencana, termasuk kesejahteraan para korban. "Selain memberikan bantuan yang bersumber dari APBD kabupaten dan

provinsi, pemkab juga berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Salah satunya bantuan BBR dari Kemensos RI," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Purworejo Kuswantoro menambahkan, sebanyak 67 keluarga korban bencana tanah bergerak menerima

bantuan Kemensos RI. Mereka merupakan warga Desa Wonotopo Kecamatan Gebang lima belas kepala keluarga (KK), Pakem Gebang delapan belas KK, Jelok Kaligesing dua puluh KK, Donorejo Kaligesing delapan KK, Tlogoguwo Kaligesing lima KK, dan Sidomulyo Purworejo satu KK. Total bantuan kementerian itu senilai Rp 1,675 miliar. **(Jas)**



KR-Dok Humas Pemkab Purworejo
Penyerahan bantuan BBR untuk korban bencana di Purworejo.

Jangan Ada Keterlambatan Pembangunan

MAGELANG (KR) - Saat berakhirnya Tahun 2020 mendatang, kegiatan beberapa proyek pembangunan diharapkan jangan sampai terjadi keterlambatan, mengingat pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau rakyat. Saat ini sudah awal Oktober 2020, masih ada waktu November dan Desember.

Demikian dikemukakan Walikota Magelang Ir H Sigit Widyonindito MT kepada wartawan usai melakukan peninjauan ke beberapa kegiatan pembangunan di Kota Magelang, Rabu (7/10).
Beberapa pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang ditinjau, dengan harapan agar jangan sampai terjadi keterlambatan. Apa yang ditinjau dan dilihat di lapangan, bagaimana antara pro-

gres yang ditargetkan dengan yang dilaksanakan.
Kegiatan kunjungan ini juga untuk memastikan akhir tahun harus sudah selesai seluruh pekerjaan, tidak ada yang tertunda atau terlambat, serta tidak ada yang terselesaikan.
Dari beberapa kegiatan pembangunan yang berlangsung dan ditinjau, semuanya dievaluasi. Tidak ada yang tidak, baik kegiatan

pembangunan saluran di Jalan Soka, pembangunan gedung DPUPR maupun pembangunan gedung Dinas Lingkungan Hidup.
Berkaitan dengan anggaran, diperoleh informasi untuk pembangunan gedung Dinas LH sekitar Rp 8,6 miliar, pembangunan gedung DPUPR sekitar Rp 17 miliar dan pembangunan drainase di Jalan Soka sekitar Rp 7,2 miliar.
Selama masa pandemi Covid-19, kendalanya antara lain tenaga kerja yang tidak gampang. Setelah diizinkan pelaksanaan pembangunannya, mereka juga harus mematuhi protokol kesehatan.
Dikatakan, selama ini Kantor Dinas Lingkungan Hidup berada

di tengah kawasan pemukiman penduduk, yaitu di wilayah Kampung Baben tidak jauh dari Gunung Tidar Magelang. Kota Magelang sendiri juga sudah sering memperoleh penghargaan Adipura, yaitu sekitar 20 tahun.
Karena ini disediakan kantor yang representatif di kawasan Sidotopo Kelurahan Kedungsari Magelang, tepatnya di depan SMAN 5 Kota Magelang.
Di masa pandemi Covid-19 ini pembangunan fisiknya tidak semua dilakukan, tetapi dengan skala prioritas dan strategis.
Yang paling prioritas dan strategis adalah menangani kesehatan masyarakat agar terlepas dari Covid-19. **(Tha)**

GANJAR KE MAPOLRESTABES SEMARANG
Jenguk Pelajar dan Buruh Yang Ditahan

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendatangi Mapolrestabes Semarang. Ganjar datang sendiri Rabu (7/10) malam pukul 22.00 untuk menjenguk para buruh dan siswa yang ditahan terkait dengan aksi demi menolak UU Cipta Kerja.
Menggunakan jaket dan mengenakan topi, Ganjar nampak duduk lesehan dan berbincang dengan sejumlah siswa dan buruh yang diamankan. Sesekali, Ganjar juga mencairkan suasana tegang dengan guyonannya. Kepada Ganjar, para siswa yang diamankan itu polos mengaku hanya ikut-ikutan aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng. Ketika ditanya tuntutan

demo, para siswa mengaku tak tahu.
"Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa," kata para siswa itu saling sahut saat ditanya Ganjar. Ada juga yang mengaku ikut-ikutan demo karena kebetulan. "Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak," katanya.
Ganjar juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama. Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di PHK. Namun para buruh yang ditanya Ganjar mengaku belum membaca naskah RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh. "Ya saya hanya baca

dari share-sharean teman," kata salah satu buruh.
Tak hanya tentang demo, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan. Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya di bawah UMK. Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi. Ganjar sempat meminta nomor telpon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja. Namun saat ditelpon Ganjar, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespon.
Ganjar mengatakan, aksi demo yang merusak sebenarnya bisa dihindari jika mau mengedepankan komunikasi. Ganjar mengaku prihatin karena ada

siswa SMA/SMK yang turut terlibat, padahal mereka tidak tahu substansi yang diuarakan. "Ini anak-anak kita lebih baik kan didukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab propinsi, sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa

memberikan fasilitas, ikut Ganjar.
Ganjar menjelaskan, sejak awal dirinya sudah mendorong kepada pemerintah pusat dan DPR agar melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Omnibus Law tersebut. **(Bdi)**



KR-Budiono
Ganjar Pranowo saat dialog dengan pelaku aksi demo yang diamankan di Polrestabes Semarang.

Dilantik, Pengurus PB MGBK Indonesia 2020-2025

SEMARANG (KR) - Ketua Dewan Pembina Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Indonesia Prof Dr H Mungin Eddy Wibowo MPd Kons, Selasa (6/10) melantik secara virtual Pengurus Besar MGBK Indonesia Periode 2020-2025 dari Semarang. Pengurus Harian PB MGBK Indonesia yang dilantik di antaranya Ketua Umum Budhy Ramdhany SPd MPd, Sekretaris Jenderal Karyadi SPd MPd, Bendahara Umum Emma Amalia SPd, dibantu 5 ketua, 5 sekretaris dan 10 departemen. Kepengurusan MGBK Indonesia terbentuk pula di 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Pelantikan dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan serial Teacher Virtual Training for School Counselor (TVT) tingkat Nasional secara daring. TVT untuk memberikan fasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan secara daring dari pakar, ahli, dan praktisi profesional kepada guru-guru Bimbingan dan Konseling/Konselor jenjang pendidikan (SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK) di Indonesia. Diharapkan mereka dapat meningkatkan kompetensi dan memahami tupoksinya secara profesional walau dalam situasi pandemi Covid-19.
Kegiatan TVT dilaksanakan dalam 3 sesi pertemuan daring 6 Oktober 2020, 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020. Selain pelantikan PB MGBK Indonesia, acara diisi pula dengan pengangkatan MPO MGBK Indonesia dengan pelindung Mendikbud RI, Menag RI, Ketua Dewan Pembina Prof Dr Mungin Eddy Wibowo MPd Kons dibantu anggota dewan pembina Prof Dr Uman Suherman MPd dan Dian Wahyuni SH Med. Selain itu, Ketua Dewan Kode Etik Dr Naharus Surur MPd, anggota Dra Cristini Puji Bintari MPd Kons, Eko Susanto MPd Kons serta Ketua Dewan Penasihat Drs Samsudin MPd, anggota Fitriyani Kamali SPd MPd dan Dra Ester Damanik MPd Kons Mpsi. **(Sgi)**

Mimbar Legislatif

APBD 2021 Fokus Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jateng bersama DPRD secara intensif melakukan koordinasi untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Pembahasan anggaran di masa pandemi Covid-19 harus menyesuaikan antara belanja rutin dengan penanganan penyebaran virus korona dan penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak.

Masalah menjadi bahasan dalam pertemuan secara virtual melalui aplikasi Zoom antara Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Jawa Tengah. Bahkan dalam kesempatan itu sejumlah anggota Banggar DPRD Jabar turut melakukan pertemuan secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Dijelaskan, pada pembahasan APBD 2021 ada sejumlah pos anggaran yang harus dilakukan rasionalisasi. Pada APBD 2020 dan anggaran perubahan antara Pemprov dan DPRD Jateng sepakat melakukan refocusing anggaran. Sejumlah alokasi be-

KR-Budiono
Bambang Kusriyanto

lanja rutin terutama pada pembangunan fisik (infrastruktur) dikurangi kemudian dialihkan pada penanganan Covid-19.

"Penetapan APBD 2021 terus dilakukan terkait refocusing anggaran untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 yang belum juga usai. Refocusing salah satunya juga diambil dari anggaran yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur, ini sebagai cara menambah anggaran penanganan Covid-19 yang terus meluas lewat pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa titik zona merah.

Sisa dari refocusing akan digunakan untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan ke wilayah terdampak dan warga yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah tersebut, diharapkan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 bisa lebih ringan. (*)

(Disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)